

BAB I

LATAR BELAKANG

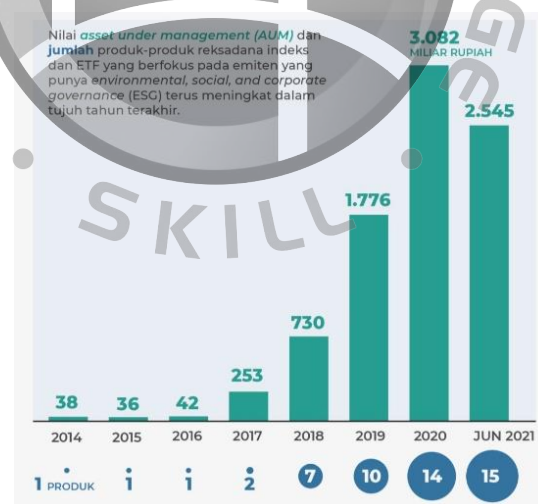
1.1. Latar Belakang

National Centre for Sustainability Reporting (NCSR) merupakan organisasi independen yang mengembangkan pelaporan keberlanjutan di Indonesia sejak tahun 2005. Tujuannya adalah mengembangkan dan menggunakan potensi anggota dan organisasi untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu program yang dilakukan secara rutin untuk mendorong hal tersebut adalah *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT), yaitu suatu ajang penghargaan bagi setiap perusahaan yang mengikuti program ini sebab telah berkomitmen dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada transparansi dan kepatuhan pelaporan *sustainability report* terhadap pedoman yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) (NCSR, n.d.).

Penerapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) akhir – akhir ini menjadi sorotan di berbagai negara. Namun, penerapan ESG di Indonesia dinilai masih tertinggal. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, indeks ESG Indonesia berada dibawah Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand (Alfaruq, 2021). Berdasarkan hasil survei *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSD) tahun 2021, indeks ESG Indonesia berada di peringkat 36 dari 47 pasar modal dunia, sebab 40% perusahaan di Indonesia masih belum sadar terhadap pentingnya penerapan ESG (Triadha, 2022). Selain itu, menurut

International Association for Public Participation Indonesia (2022) tantangan lain bagi Indonesia dalam menerapkan ESG adalah terkait dengan SDM, yaitu masih banyak SDM di Indonesia yang belum memiliki pemahaman optimal terkait ESG (Ghazali & Zulmaita, 2020)

Tuntutan akan penerapan ESG di Indonesia khususnya di pasar modal terus digaungkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk mengungkap aspek-aspek keberlanjutan dimana aspek ESG ada didalamnya yaitu *Environmental* (lingkungan hidup), *Social* (sosial), dan *Governance* (tatakelola).



Gambar 1. 1 Peningkatan Investasi ESG di Pasar Modal Indonesia

Sumber: BEI, Beritasatu Research (2021)

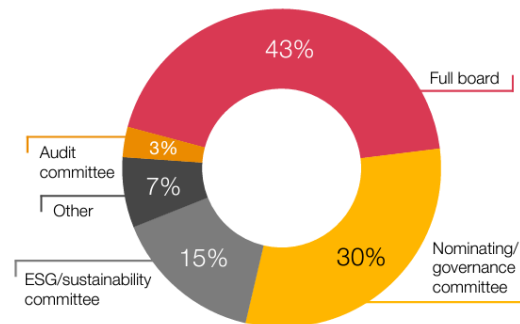
Kondisi pandemi Covid-19 yang menghantam dunia hingga saat ini, mendorong investor untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam menentukan keputusan investasi (Pazzoli et.al., 2022). Hal ini dibuktikan bahwa selama tahun 2019 - 2021, yaitu saat masa pandemi Covid-19 berlangsung, investasi akan emiten yang menerapkan ESG di pasar modal Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dimana sebelumnya pada tahun 2016 hanya terdapat 1 produk ESG di pasar modal Indonesia, sementara di tahun 2021 yaitu saat masa pandemi Covid-19 berlangsung mengalami peningkatan drastis menjadi 15 produk ESG dengan nilai Rp 3,45 triliun. Selain itu, Adams & Abhyawansa (2022) juga menyatakan bahwa keadaan pandemi Covid-19 menjadi momentum berharga akan perkembangan pelaporan non-keuangan yang berdasarkan pernyataan IOSCO (2020) selama pandemi Covid-19 investasi berkelanjutan mengalami peningkatan hingga memicu para investor dan regulator sekuritas untuk menyerukan transparansi, komparabilitas, dan konsistensi informasi terkait pengungkapan ESG (Adams & Abhayawansa, 2022).

Timbulnya seruan akan transparansi, komparabilitas dan konsistensi informasi pengungkapan ESG dipicu oleh kekhawatiran akan keakuratan dan keandalan pengungkapan ESG, sebab pengungkapan ESG masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum adanya standar pelaporan yang ketat (Arif et.al., 2020) sehingga sering diintervensi oleh pihak manajemen untuk memajukan reputasi dan kepentingan pribadi mereka (Josua & Septiani, 2020).

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) tahun 2020, aktivitas PT Indominco Mandiri selaku salah satu anak

perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk. telah mencemarkan Sungai Palakan. Fakta temuan yang diambil berdasarkan sampel air di beberapa titik *settling pond* menunjukkan bahwa air Sungai Palakan telah melebihi ambang baku mutu air sungai yang telah ditentukan. Selain itu, berdasarkan kesaksian warga, air buangan dari *settling pond* PT Indominco Mandiri juga berbahaya bagi kesehatan manusia maupun habitat sekitarnya yang mana air sungai terasa gatal jika terkena kulit manusia, serta banyaknya habitat sungai dan pohon kayu disekitar *settling pond* yang mati (Rahman et al., 2020). Jika melihat aspek ESG dalam *sustainability report* PT Indo Tambangraya Megah Tbk. tahun 2020, keadaan tersebut tidak diungkapkan. Dalam *sustainability report* PT Indo Tambangraya Megah Tbk. tahun 2020 menyatakan bahwa baku mutu air PT Indominco Mandiri pada Sungai Palakan berada dibawah ketentuan serta akibat pelepasan *effluen*, habitat di dalam sungai tidak terpengaruhi. Atas hal tersebut transparansi akan pengungkapan aspek ESG dalam *sustainability report* PT Indo Tambangraya Megah Tbk. dapat dianggap belum transparan, akurat, dan andal.

Permasalahan ini menggambarkan bahwa keakuratan dan keandalan pengungkapan ESG masih dipertanyakan. Oleh sebab itu perlu adanya pengendalian internal independen untuk memastikan pengungkapan ESG telah dilakukan secara transparan dan berkualitas (Arif et al., 2020).



Note: 2% responded None/Not applicable

Source: Diligent Institute & Spencer Stuart, *Sustainability in the Spotlight: Board ESG Oversight and Strategy*, May 2022.

Gambar 1. 2 Peran Dewan dan Komite Audit dalam ESG *Disclosure*

Sumber: pwc.com (2021)

Berdasarkan laporan PWC (2022) ESG menjadi salah satu tanggung jawab Dewan baik Direksi dan Dewan Komisaris khususnya dalam mengawasi bagaimana strategi ESG selaras dengan strategi bisnis. Dalam hal ini Dewan memiliki peran penting dalam menerjemahkan nilai ESG ke dalam strategi organisasi, mengawasi aktivitas organisasi dari perspektif ESG (Joelly, 2021), mengidentifikasi isu-isu kunci ESG yang mungkin berdampak pada perusahaan, dan menyepakati target dan tindakan dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data ESG (Angele, 2022).

Dengan adanya Dewan, pengungkapan ESG dinilai akan lebih berkualitas sebab menurut Chebbi & Ammer (2022) Dewan mampu meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan terkait strategi, kebijakan, dan keputusan ESG serta memotivasi manajemen untuk mengungkapkan informasi ESG secara lebih transparan. Walaupun memiliki peran besar dalam ESG yaitu sebesar 43% (PWC, 2022), masih belum banyak Dewan yang memiliki pengetahuan dan *skill* khusus dalam ESG (Angele, 2022).

Dalam membantu peran Dewan Komisaris, Komite Audit juga memiliki peran penting yaitu membantu perusahaan mengawasi pengungkapan, pengendalian, proses, dan jaminan ESG yang bertujuan untuk mengembangkan pengungkapan ESG khususnya dalam memenuhi tuntutan investor. Dalam mengungkapkan ESG, perusahaan harus memilih metrik ESG yang dapat mendorong nilai material untuk bisnis, serta memastikan bahwa data ESG yang diungkapkan dapat diandalkan. Oleh sebab itu Komite Audit dianggap berada pada porsi yang tepat sebab diperlukannya pengembangan kebijakan, proses, pengendalian internal, dan tata kelola yang sama dengan yang mereka miliki untuk mengumpulkan dan mengungkapkan informasi keuangan (PWC, 2022).

Sejalan dengan penelitian Appuhami dan Tashakor (2017) yang berpendapat bahwa komite audit yang independen dan terlibat dapat memberikan pengawasan yang efisien terhadap dewan dalam pengungkapan sukarela, sebab keberadaan komite audit dianggap akan meningkatkan pengawasan dewan, kinerja auditor dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan (Arif et al., 2020; Pozzoli et al., 2022). Namun, hasil penelitian PWC (2020) menyatakan bahwa dalam ESG komite audit hanya berperan 3%.

Selain dari pihak internal, adanya pengawasan dari pihak independen eksternal dalam pengungkapan ESG perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (Pozzoli et al., 2022). Pengawasan pihak independen eksternal dapat dilihat berdasarkan kualitas audit yaitu kemampuan auditor eksternal dalam menemukan ketidaksesuaian terhadap prinsip dan standar

yang berlaku (Pramesti & Wiratmaja, 2017). Ketika perusahaan mengalokasikan lebih banyak sumber daya seperti membayar biaya audit (*fee audit*) yang lebih tinggi atau menggunakan auditor spesialis industri, maka kualitas audit akan lebih tinggi (Hammami & Hendijani Zadeh, 2020).

Pada dasarnya biaya audit ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan auditor dengan mempertimbangkan tingkat keahlian, kompleksitas, tugas dan tanggung jawab, kebutuhan klien, banyak waktu yang diperlukan, dll (Idawati, 2018). Namun, fakta menunjukkan biaya audit sering dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka mencapai pelaporan yang sesuai, sehingga independensi auditor terganggu. Seperti Kasus Auditor Publik Marlina dan Merliyana Syamsul dari KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan yang merupakan partner KAP Deloitte Indonesia. Auditor Publik Marlina dan Merliyana Syamsul diketahui melakukan pelanggaran berat dalam prosedur audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yaitu menetapkan opini yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Atas pelanggaran tersebut Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif pembatalan pendaftaran kepada Auditor Publik Marlina dan Merliyana Syamsul, serta KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (Purnomo, 2018).

Dewan Komisaris Independen menunjukan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki afliasi dengan manajemen dan dewan lainnya. Sebagai organ perusahaan yang mewakili para pemangku kepentingan adanya Dewan Komisaris Independen dinilai dapat meningkatkan pengungkapan ESG (Husted & Sousa-

Filho, 2019). Penelitian (Aryssi et al., 2020; Chebbi & Ammer, 2022; GÜNGÖR & ŞEKER, 2022; Gurol & Lagasio, 2022; Husted & Sousa-Filho, 2019; Kamaludin et al., 2022; Septiana & Puspawati, 2022) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap *ESG Disclosure*. Sedangkan penelitian (Birindelli et al., 2018; Disli et al., 2022) menyatakan Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *ESG Disclosure*

Kualitas Audit menunjukkan kemampuan seorang auditor untuk mengurangi bias data. Kualitas audit setiap perusahaan biasanya mencerminkan kemampuan dan profesionalisme seorang auditor serta KAP yang dipilih. Penelitian (Hammami & Hendijani Zadeh, 2020) menyatakan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *ESG Disclosure*. Sedangkan penelitian (Septiana & Puspawati, 2022) menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *ESG Disclosure*.

Penelitian ini menggunakan Komite Audit sebagai moderasi, sebab keberadaan Komite Audit ditujukan untuk memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisari serta meningkatkan pengawasan terhadap auditor eksternal. Selain itu, Komite yang memiliki keahlian Akuntansi dan Keuangan dinilai dapat meningkatkan transparansi *ESG Disclosure*. Penelitian (Dwekat et al., 2020; Pozzoli et al., 2022) menyatakan Komite yang memiliki keahlian Akuntansi dan Keuangan berpengaruh positif terhadap *ESG Disclosure*. Sedangkan penelitian (A. Buallay & Al-Ajmi, 2020) menyatakan Komite yang memiliki keahlian Akuntansi dan Keuangan berpengaruh negative terhadap *ESG Disclosure*.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian serta minimnya penelitian di Indonesia, sehingga dinilai masih terdapat *gap research* dalam penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Husted & Sousa-Filho, 2019). Dalam penelitiannya Husted & Sousa-Filho (2019) menyatakan *Independent Directors* dan *Board Size* berpengaruh signifikan positif terhadap *ESG Disclosure*, *CEO Duality* berpengaruh signifikan negatif terhadap *ESG Disclosure*, dan *Woman on Board* tidak berpengaruh terhadap *ESG Disclosure*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) Periode pengamatan penelitian sebelumnya adalah tahun 2011 – 2014, sedangkan penelitian ini memiliki periode pengamatan penelitian lebih luas dan terbaru yaitu tahun 2017 – 2021, (2) Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan di terbuka di Amerika Latin, sedangkan objek penelitian ini menggunakan perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan yang mengikuti *Asia Sustainability Reporting Rating*, (3) Penelitian ini hanya akan berfokus pada pengaruh Dewan Komisaris Independen sebagai pengendali internal. Namun menambahkan Kualitas Audit sebagai variabel independen untuk melihat pengendalian dari pihak independen eksternal (4) Penelitian ini menggunakan Komite Audit sebagai moderasi.

Dengan adanya perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka penelitian ini berjudul ***“Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap ESG Disclosure dengan Komite Audit Sebagai Moderating Pada***

Perusahaan yang Mengikuti Asia Sustainability Reporting Rating Periode 2017-2021”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tuntutan dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator akan penerapan ESG dalam rangka menerapkan pembangunan berkelanjutan dan keuangan berkelanjutan.
2. Meningkatnya kesadaran yang ditandai dengan meningkatnya emiten ESG, sehingga timbul tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi akan pengungkapan ESG. Oleh sebab itu diperlukannya pengendalian internal dan eksternal independen untuk memastikan pengungkapan ESG telah dilakukan secara transparan.
3. Masih terdapat perusahaan yang tidak mengungkap aspek ESG secara transparan.
4. Dewan Komisaris memiliki peran besar dalam ESG, namun masih banyak Dewan Komisaris yang tidak memiliki pengetahuan dan skill khusus tentang ESG.
5. Walaupun memiliki peran penting dalam pengungkapan ESG, komite audit memiliki peran yang kecil jika dibandingkan *full board*.
6. Masih terdapat kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengungkapan, sebab kualitas audit dinilai belum mencerminkan keadaan perusahaan secara transparan.

7. Adanya hasil penelitian sebelumnya yang inkonsisten dan belum banyaknya penelitian yang dilakukan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Data penelitian hanya berfokus pada perusahaan yang mengikuti *Asia Sustainability Reporting Rating* dan mempublikasikan *annual report* serta *sustainability report* periode 2017-2021.
2. Penelitian hanya akan berfokus dalam meneliti pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap *Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure* dengan Komite Audit sebagai moderasi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *ESG Disclosure*?
2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *ESG Disclosure*?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen yang dimoderasi oleh Komite Audit berpengaruh terhadap *ESG Disclosure*?
4. Apakah Kualitas Audit yang dimoderasi oleh Komite Audit berpengaruh terhadap *ESG Disclosure*?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *ESG Disclosure*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap *ESG Disclosure*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen yang dimoreasi oleh Komite Audit terhadap *ESG Disclosure*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Audit yang dimoreasi oleh Komite Audit terhadap *ESG Disclosure*.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman bagi para pembaca mengenai pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap *ESG Disclosure* dengan Komite Audit sebagai *moderating*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pengetahuan, referensi, dan pembandingan bagi penelitian selanjutnya mengingat penelitian mengenai hal ini masih minim di Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktisi

1. Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini diharapkan perusahaan lebih memahami pentingnya penerapan ESG serta pentingnya pengendali internal dan eksternal dalam melakukan pengawasan ESG *Disclosure*. Mengingat belum adanya peraturan yang ketat dalam mengungkapkan aspek ESG.

2. Bagi Investor dan *Stakeholder*

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kepercayaan investor maupun *stakeholder* mengenai keakuratan dan keandalan pengungkapan ESG yang disajikan perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.7. Sistematika Penelitian

Penulisan Skripsi disusun dengan sistematis berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Sistematika penulisan skripsi terdiri dari:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab I dalam penulisan skripsi berisikan pendahuluan yang berkaitan dengan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab II dalam penulisan skripsi berisikan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang menjadi jawaban sementara atas masalah yang dibahas dalam penelitian.

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab III dalam penulisan skripsi berisikan objek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan tabel operasional variabel, teknik pengolahan data dan analisis data, serta teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV dalam penulisan skripsi berisikan pengujian hipotesis penelitian yaitu penyajian hasil dan pengujian hipotesis yang juga didasarkan oleh teori serta perbandingan dengan penelitian terdahulu.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V dalam penulisan skripsi berisikan pembahasan terkait kesimpulan atas hasil uji, implikasi atas penelitian, serta saran dan keterbatasan dalam penelitian yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.